

**ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN  
KINERJA ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY*  
PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI  
COMAL DINAS PUSDATARU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menempuh Mata Kuliah  
Skripsi Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

**OLEH:**

**ANTI WIDIANTI**

**19110019**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI**

**SEKTOR PUBLIK**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA KOTA TEGAL**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anti Widianti

NIM : 19110019

Adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, dengan ini saya menyatakan bahwa laporan skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KINERJA ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL DINAS PUSDATARU”**

Merupakan hasil pemikiran sendiri secara orisinil dan saya susun secara mandiri dengan tidak melanggar kode etik hak cipta. Pada laporan skripsi ini juga bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebabkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari Skripsi ini terbukti melanggar kode etik hak cipta atau mengandung unsure plagiarisme, saya bersedia melakukan penelitian lebih lanjut dan menulis ulang skripsi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Tegal, 17 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Anti Widianti  
NIM. 19110019

## HALAMAN REKOMENDASI

Pembimbing Skripsi memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Anti Widianti

NIM : 19110019

Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran  
Berkonsep *Value For Money* Pada Balai Pengelolaan Sumber  
Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU

Mahasiswa tersebut telah menyatakan selesai melaksanakan bimbingan dan dapat mengikuti Ujian Skripsi pada tahun akademik 2023

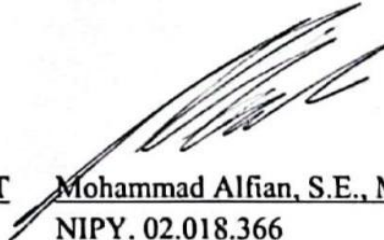
Tegal, 17 Juli 2023

Pembimbing I



Nurul Mahmudah, S.E., M.Si, Ak, CA, CAAT  
NIPY. 09.015.243

Pembimbing II



Mohammad Alfian, S.E., M.Si, Ak  
NIPY. 02.018.366

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anti Widianti

NIM : 19110019

Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran  
Berkonsep *Value For Money* Pada Balai Pengelolaan Sumber  
Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU

Dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ setelah dipertahankan di hadapan Dewan  
Penguji Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Publik Politeknik  
Harapan Bersama.

Tegal, 14 Agustus 2023

Dewan Penguji :

Ketua : Nurul Mahmudah, S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT

Anggota I : Erni Unggul S.U., S.E., M.Si

Anggota II : Andri Widiyanto, M.Si.

Nama Tanda Tangan

1. ....

2. ....

3. ....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

Mohammad Alfian, S.E., M.Si, Ak

NIPY 02/018.366



**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Anti Widianti

NIM : 19110019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pemali Comal Dinas PUSDATARU**"

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive royalty free right*) ini Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasi ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan



Anti Widianti

19110019

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pujisyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk saya dalam mengerjakan Skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Bapak Edi Toto Raharjo dan Ibu Iing Rusiatin, Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk Bapak dan Ibu tercinta yang tanpa lelah untuk selalu mendoakan saya disetiap waktunya. Terimakasih sudah selalu member ketenangan, kebahagiaan, doa terbaiknya dan selalu menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Terimakasih untuk segala hal baik dan untuk semuanya.
2. Terimakasih untuk dosen pembimbing saya, Ibu Nurul Mahmudah, M.Si, Ak, CA, CAAT dan Bapak Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan dengan sabar memberikan arahan kepada saya.
3. Terimakasih untuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU yang telah memberi izin dan dukungan untuk penelitian skripsi ini.
4. Terimakasih untuk segenap Civitas akademika Politeknik Harapan Bersama.
5. Terimakasih untuk teman-teman satu angkatan 2019 DIV Akuntansi sektor publik.

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU berdasarkan 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU berdasarkan program kerjanya sudah dikatakan transparan, serta akuntabilitasnya sudah sesuai dengan pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan, dilihat dari rasio ekonomisnya pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa kinerja anggarannya dengan realisasinya sudah dikatakan ekonomis sebab dengan nilai perbandingan yang diperoleh kurang dari 100%. Serta dilihat dari rasio efisiensinya pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa hasil dari pencapaian melalui program kerjanya dan realisasinya dan realisasinya sudah dikatakan efisien cukup seimbang dan efisien dari dengan nilai perbandingan sama dengan 100% dan juga lebih dari 100%. Rasio efektivitasnya di tahun 2021 terdapat 17 kegiatan dengan nilai efektifitas cukup seimbang dengan nilai perbandingan sama dengan 100%, tahun 2022 terdapat 12 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan nilai perbandingan sama dengan 100% dan 2 kegiatan dengan nilai sangat efektivitas dengan nilai perbandingan lebih dari 100%.

**Kata Kunci :** Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran

## **ABSTRACT**

*The study aims to determine transparency, accountability, and budget performance with the concept of Value for Money at the Pemali Comal PSDA Center of the PUSDATARU Office based on 3 elements, namely Economic, Efficiency, and Effectiveness. This type of research is qualitative descriptive research. The results of research at the Pemali Comal PSDA Center of the PUSDATARU Office based on its work program have been said to be transparent, and the accountability is in accordance with its accountability, while the budget performance between its realization is in accordance with what has been budgeted, judging from its economic ratio in 2021 and 2022 shows that its budget performance with its realization has been said to be economical because the comparison value obtained is less than 100%. And judging from the efficiency ratio in 2021 and 2022, it shows that the results of achievements through its work programs and their realization and realization have been said to be efficient, quite balanced and efficient from a comparison value equal to 100% and also more than 100%. The effectiveness ratio in 2021 there are 17 activities with a fairly balanced effectiveness value with a comparison value equal to 100%, in 2022 there are 12 activities with a fairly balanced effectiveness value with a comparison value equal to 100% and 2 activities with a very effective value with a comparison value of more than 100%.*

**Keyword** : *Transparency, Accountability, and Budget Performance*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KINERJA ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL DINAS PUSDATARU”** .

Skripsi ini saya ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan (S.Tr) pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama.

Selama proses penyusunan Skripsi ini saya mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Agung Hendarto, S.E., MA selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Bapak Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak selaku Kaprodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Nurul Mahmudah, M.Si, Ak, CA, CAAT selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang berada di Politeknik Harapan Bersama khususnya dosen Prodi Akuntansi Sektor Publik yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Politeknik Harapan Bersama terutama di Prodi Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bantuannya kepada saya.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam penyusunan, penulisan, ataupun isinya. Oleh karena itu segala kritik dan saran saya terima dengan senang hati demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, 17 Juli 2023

Penulis



Anti Widianti  
19110019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1    Landasan Teori .....	10
2.1.1    Transparansi .....	10
2.1.2    Akuntabilitas .....	11
2.1.3    Konsep <i>Value for Money</i> .....	12
2.1.4    Kinerja Anggaran .....	12
2.1.5    Pengukuran Kinerja Anggaran.....	14
2.1.6    Faktor Penentu Kinerja Anggaran.....	15
2.1.7    Karakteristik Kinerja Anggaran .....	16
2.1.8 <i>Value for Money</i> .....	17
2.1.9    Indikator <i>Value for Money</i> .....	18

2.1.10	Manfaat Implementasi.....	20
2.1.11	Skematik <i>Value for Money</i> .....	21
2.1.12	Pengukuran <i>Value for Money</i> .....	21
2.2	Telaah Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODOLOGI.....		29
3.1	Desain Penelitian.....	29
3.2	Lokasi Objek Penelitian.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1	Jenis Data.....	29
3.3.2	Sumber Data.....	29
3.3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3.4	Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....		32
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.2	Struktur Organisasi.....	36
4.3	Transparansi.....	36
4.4	Akuntabilitas.....	38
4.5	Analisis Data.....	40
4.6	Pembahasan.....	61
4.6.1	Analisis <i>Value for Money</i> pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Ekonomis.....	61
4.6.2	Analisis <i>Value for Money</i> pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efisiensi.....	63
4.6.3	Analisis <i>Value for Money</i> pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efektivitas.....	64
BAB V PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN.....		71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skematik Value For Money .....	21
Gambar 2: Rasio Ekonomi .....	23
Gambar 3: Rasio Efisiensi.....	24
Gambar 4: Rasio Efektivitas .....	25
Gambar 5 : Wilayah Kerja Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU ....	34
Gambar 6 : Struktur Organisasi BPSDA PC Dinas PUSDATARU .....	36
Gambar 7 : Laporan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 .....	75
Gambar 8 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 .....	76
Gambar 9 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2022 .....	76
Gambar 10 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2022 ....	77
Gambar 11 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	78
Gambar 12 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	79
Gambar 13 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I .....	81
Gambar 14 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	83
Gambar 15 : Surat Keterangan Hasil Plagiasi.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Ekonomis .....	23
Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi .....	24
Tabel 2. 3 Kriteria Efektitas .....	26
Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2021.....	41
Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2022.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2021 .....	44
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comaal Dinas PUSDATARU Tahun 2022 .....	47
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Efisisensi Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2021 .....	51
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2022 .....	53
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2021.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU Tahun 2022.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	71
Lampiran 2 Wilayah Kerja BPSDA PC Dinas PUSDATARU.....	73
Lampiran 3 Hasil Wawancara Pihak BPSDA PC Dinas PUSDATARU.....	73
Lampiran 4 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 dan 2022.....	75
Lampiran 5 Lembar Kesepakatan Bimbingan Skripsi .....	78
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi.....	80
Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Plagiasi .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era modern saat ini, setiap individu mempunyai kebebasan dalam bertindak maupun bernegara, adanya informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran di media sosial. Transparansi sebagai program wajib yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang memerlukan transparansi informasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Organisasi sektor publik mempunyai hak serta kewajiban untuk mengetahui tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi sektor publik saat ini, sering disalahkan oleh masyarakat sebagai organisasi yang kurang optimal, tidak produktif dan kualitas kinerjanya rendah, sehingga juga membuang-buang uang. Organisasi sektor publik kini berada di bawah tekanan masyarakat untuk lebih efisien dalam menghitung biaya ekonomi maupun sosial, secara lebih efektif akibat dampak negatif terhadap kegiatan yang dilakukan. (*Setda*, 2022)

Akuntabilitas sangat penting jika diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, karena berdasarkan argumentasi bahwa keberadaan negara bergantung pada masyarakat, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bertanggungjawab dan bermutu. Menghadapi kebutuhan masyarakat yang



semakin meningkat, maka memberikan pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan peran serta pihak swasta. Untuk menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikembangkan suatu sistem akuntabilitas secara efisien, tertib, efektif dan jelas dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau sering terdengar sebagai sebutan SAKIP (*AKUNTABILITAS: MENUJU INDONESIA BERKINERJA*, t.t.).

Akuntabilitas dan Transparansi berjalan beriringan, karena dalam melaksanakan akuntabilitas diperlukan adanya transparansi. Sebab, pemerintah yang demokratis memerlukan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan suatu badan publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas suatu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga publik. Persoalan akuntabilitas dan transparansi suatu persoalan implementasi pemerintan daerah yang dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangan saat ini. Jika itu terjadi, hal ini dapat memperkuat kebutuhan akan akuntabilitas publik dan transparansi publik dalam suatu lembaga publik. Hal ini tidak terlepas dari mereka yang mencita-citakan terbentuknya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sebagai lembaga negara yang bertugas mengkaji pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satu lembaga yang berperan penting dalam melindungi dan memastikan keuangan negara digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, harus memahami konsep pelaporan keuangan dan

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tepat dan akurat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan standar yang digunakan dalam SAP akan mempengaruhi opini auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan. (Nina Rosalin Siahaan\_2018.).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan juga non-keuangan. Indikatornya mencakup *Input*, seperti jumlah modal yang dibutuhkan, jumlah staf yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada dan juga waktu penggunaan. Apakah itu salah satu indikator proses kepatuhan hukum dan peraturan serta rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan atau menghasilkan suatu layanan. Kemudian indeks *output* adalah kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan konsisten produksi barang atau jasa tersebut. Hasilnya adalah tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta produktivitas pegawai dan pekerjanya. Manfaat maupun benefit baik pada tingkat kepuasan masyarakat maupun pada tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan dampak *impact* terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatannya. (Dwi Purwanti, 2017)

Pada era yang semakin canggih sekarang, persepsi masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan memerlukan interpretasi terhadap keterbukaan anggaran serta kinerja sektor publik. Masyarakat seringkali memandang organisasi sektor publik adalah tempat sumber kebocoran arus modal yang keluar, dan organisasi yang terus-

menerus merugi. Masyarakat menuntut agar adanya keterbukaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan serangkaian landasan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan pemerintahan yang baik, khususnya pemerintahan yang bersih, efisien, transparans, responsive, dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak serta kewajiban masyarakat yang mampu mengatur sendiri urusan yang dijalankan dalam mencapai tujuan memberikan kepentingan bagi masyarakat Indonesia, supaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan hidup daerahnya. Selain itu, terdapat hak untuk mengurus kepentingan masyarakat yang didasarkan pada aspirasi masyarakat didalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015*).

Melalui konsep *Value for Money* telah memberikan informasi berupa indikator yang menunjukkan apakah anggaran tersebut dibelanjakan atau yang dikeluarkan tersebut menciptakan nilai tertentu bagi masyarakat atau tidak. Sektor publik sering kali dipandang sebagai sumber inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran arus modal yang keluar, maupun organisasi yang selalu merugi. Tuntutan baru telah muncul bagi organisasi sektor publik untuk memperhatikan nilai uang ketika menjalankan aktivitasnya. Melalui konsep ini, selain evaluasi finansial,

evaluasi kinerja non finansial juga mencakup evaluasi kualitas layanan yang berfokus pada kualitas yang konsisten, khususnya untuk pemenuhan harapan pelanggan. (Ganjar & Nugraha, 2022)

Pemerintahan daerah mengurus urusan pemerintahan yang menjadi keewenangannya dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Meskipun beberapa urusan pemerintahan seperti pertahanan, moneter, fiskal nasional sampai kebijakan luar negeri semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Implementasi keterampilan ini dilengkapi dengan transfer dan pendanaan, peralatan dan infrastruktur, serta SDM. Hibah yang diajukan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan kewenangan dan penyerahan pendanaan tersebut untuk menyelaraskan kebutuhan keuangan antara tanggungjawab pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan, kemudian, pengembangan dan penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan sebagai alat transparansi untuk mencapai akuntabilitas publik guna mencapai *good governance*. Hal ini salah satu cara transformasi pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyusunan APBD serta APBN.

Pemerintah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara. Terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini tertuang dalam peraturan terkait

prinsip umum pada pengelolaan keuangan negara atau dikenal juga dengan akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara untuk mengevaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan mengukur atau mengevaluasi kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga tahap pelaksanaan anggaran, dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Maka jika dicermati, konsep ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, pada kenyataannya adalah salah satu prinsip penting penganggaran berbasis kinerja untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sangat jelas bahwa langkah ini diperlukan agar berbagai instansi pemerinta d dapat mencapai kinerjanya. Dinas Pengelolaan SDA Pemali Comal salah satu instansi atau oraganisasi pemerintah yang berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Balai ini bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan operasional kepada masyarakat di bidang sumber daya air dan menyelenggarakan konservasi SDA, serta mengendalikan daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, embung, saluran, daerah irigasi dan rawa.

Pada Penelitian Melinda (2022) yang berjudul “Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas komunikasi, Informasi dan Statistika” dengan tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dengan prinsip *Value for Money*. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitan ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan

adalah LAKIP dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020. penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dilihat dari tiga elemen utama yaitu: Ekonomis, Efektivitas dan Efisiensi dalam konsep *Value for Money* belum mencapai hasil yang maksimal atau belum memenuhi prinsip value for money (Melinda, 2022).

Pada penelitian Rahman (2021) yang berjudul “Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan di Dinas ESDM pada tahun 2017-2019 berdasarkan *value for money*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan pada Dinas ESDM menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas ESDM pada Rasio Ekonomis 2017-2019 sudah baik. Namun hasil Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dianggap sebagai efisiensi operasional dan belum efektif. (Rahman, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, saya akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal”

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* pada Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* pada Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitaian ini diharapkan dapat mengetahui ilmu pengetahuan mengenai Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran yang Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai alat yang tepat untuk menerapkan teori akuntansi yang telah dipelajari selama perkuliahan dan pihak Dinas Pengelolaan SDA Pemali Comal dapat berbagi pengetahuan secara khusus dengan tentang konsep *Value for Money*.

#### b. Bagi Instansi (Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU)

Saya Berharap penelitian ini bisa menjadi ikut sertaan dalam pengambilan keputusan bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk sumber referensi dan bisa dikembangkan manjadi lebih sempurna bagi penelitan selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### 2.1.1 Transparansi

Transparansi yang digunakan pada terminologi politik yang berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Transparansi merupakan keterbukaan, yang artinya keputusan dilakukan serta pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara ataupun mekanisme yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Transparansi dapat dipahami sebagai informasi tentang suatu organisasi tersedia secara bebas serta dapat diakses oleh siapa saja yang terkena dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Jika ada informasi yang tidak bisa dipublikasikan atau dirahasiakan, harus ada kriteria yang jelas. Keterbukaan ini dapat dipahami sebagai informasi yang lengkap mengenai kegiatan organisasi serta disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Banyak pihak yang menyatakan bahwa transparansi itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Ada yang menyatakan bahwa keduanya menyangkut materi dan ruang lingkungannya, dan ada juga transparansi dan akuntabilitas mencakup semua aspek termasuk program dan keuangan.

### 2.1.2 Akuntabilitas

Istilah Akuntabilitas adalah hal yang mungkin sering kita temukan dalam pengelolaan atau pengurusan perusahaan atau bahkan pemerintah. Akuntabilitas melekat pada pertanggungjawaban. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Akuntabilitas diartikan sebagai keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang pemberi amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah, pemegang hak serta penanggung jawab. Sedangkan menurut Teguh Arifiyadi (2018) pengertian akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu yang bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya publik yang mempengaruhinya dan kemudian mampu menjawab pertanyaan mengenai akuntabilitasnya. Akuntabilitas sendiri mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pengendalian kinerja, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pelayanan publik dan komunikasi transparan tujuan tersebut kepada publik. Sedangkan menurut Sirajudin Saleh dan Aslam Iqbal, pengertian tanggung jawab adalah sikap dan watak hidup manusia, termasuk tanggungjawab internal dan eksternal seseorang.

### 2.1.3 Konsep *Value for Money*

*Value for Money* yang dapat dicapai jika sektor publik menggunakan biaya *input* yang serendah-rendahnya agar tercapainya *output* yang optimal guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sektor publik. Dapat diimplementasikan berdasarkan konsep *value for money*, bisa meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan efisiensi operasional. *Value for money* juga salah satu konsep penilaian kerja suatu organisasi sektor publik, yang dinilai berdasarkan tingkat pencapaian suatu program kerja. Tingkat keberhasilan mengacu pada 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi serta Efektifitas. Melalui konsep ini diharapkan organisasi pemerintah bisa mengetahui, mengukur serta mengevaluasi kinerjanya dalam jangka waktu tertentu, mengurangi kerugian serta pemborosan modal, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

### 2.1.4 Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan *performance budgeting*, evaluasi dan pengukuran biaya yang dianggarkan yang digunakan untuk memproduksi atau mengembangkan produk atau layanan, evaluasi dan pengukuran dilakukan dengan mengelompokkan akun anggaran kedalam kategori terkait produk atau layanan tersebut. Penganggaran berbasis kinerja bukanlah sesuatu hal baru, komitmen ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 yang terbitkan serta dilaksanakan melalui Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006. (*Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro*).

Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang memungkinkan manajemen menghubungkan setiap biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan beserta manfaat yang diperoleh. Manfaat yang diurankan dalam serangkaian tujuan yang telah tertuang dalam sasaran kinerja masing-masing unit kerja. Penganggaran berbasis kinerja yang efektif mengidentifikasi hubungan antara nilai uang serta hasil, dan dapat menjelaskan mengapa hubungan ini penting untuk pengelolaan program yang efektif. Ada instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3 yang menyatakan “Belanja Daerah yang dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” hal serupa dinyatakan pada Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 yaitu “ penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar pelayanan minimal”. Kemudian di pertegas oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat 1 yang secara jelas menyatakan bahwa penyusunan RKA SKPD didasarkan pada pelaksanaan pekerjaan,

analisis standar pengeluaran, kesatuan standar harga dan pelayanan minimal standar. Oleh karena itu, unsure-unsur utama perencanaan serta penganggaran berbasis kinerja mencakup analisis standar pengeluaran, standar pelayanan minimum, indikator kinerja, sasaran kinerja, serta standar harga satuan. (*Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro*).

#### 2.1.5 Pengukuran Kinerja Anggaran

Pengukuran Kinerja merupakan langkah-langkah pengukuran yang dilakukan dalam berbagai aktivitas rantai nilai dalam perusahaan. Hasil pengukuran kemudian dijadikan sebagai umpan balik berupa tindakan yang efektif dan efisien, yang juga akan menginformasikan mengenai pelaksanaan rencana dan kapan perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap kegiatan perencanaan serta pengendalian.

Menurut Hansen dan Mowen pengukuran kinerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran tradisional serta pengukuran modern. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dilanggar atau biaya standar tergantung pada sifat tanggung jawabnya. Sedangkan pengukuran kinerja modern menggunakan aktivitas yang sebagai landasannya. Ukuran kinerja dirancang sebagai nilai kualitas kinerja kegiatan dan dapat menentukan apakah perbaikan berkelanjutan telah dilakukan.

Sistem pengukuran kinerja adalah mekanisme yang membantu meningkatkan kemampuan organisasi untuk berhasil melaksanakan strateginya. Menurut Yuwono, sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem pencatatan dan pengukuran kinerja kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu misi melalui hasil yang ditampilkan sebagai produk, jasa serta proses. Sedangkan menurut Mahmudi (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses mengevaluasi kemajuan kerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, meliputi informasi mengenai efektivitas penggunaan sumber daya yang baik berupa barang ataupun jasa, membandingkan hasil pekerjaan dengan tujuan dan efektivitas tindakan untuk mencapainya tujuan tersebut.

#### 2.1.6 Faktor Penentu Kinerja Anggaran

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang merupakan sebuah peluang untuk pemerintah namun juga menjadi sebuah tantangan. Dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang artinya pemerintah daerah dapat menyusun pedoman, kebijakan, serta program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta lingkungan di wilayahnya. Namun Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih, terutama untuk memenuhi aspirasi masyarakat, dengan skala prioritas yang harus akurat dan fungsi kontrol yang lebih ketat. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah pencapaian penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi,

pengelolaan sistem administrasi, SDM dan waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu target.

Hal ini sesuai teks pedoman penganggaran berbasis hasil yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa memerlukan persiapan sejumlah faktor agar berhasil menerapkan penganggaran berbasis kinerja yaitu: (Hasan, 2018)

- a. Gaya kepemimpinan dan komitmen seluruh elemen dalam organisasi.
- b. Penyempurnaan sistem administrasi.
- c. Sumber daya yang memadai
- d. Penghargaan/reward yang jelas
- e. Sanksi/*punishment* yang tegas.

#### 2.1.7 Karakteristik Kinerja Anggaran

Instansi atau organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, merupakan organisasi sektor publik yang bertugas melaksanakan tugas masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada publik. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, instansi atau organisasi pemerintah menggunakan dana APBN dan APBD yang bersumber dari pajak, retribusi atau pendapatan lain yang dibayar oleh masyarakat. Pertunjukan kinerja publik yang rutin diadakan sebagai cermin kualitas birokrasi secara umum. Pengukuran kinerja ini kembali berguna untuk menilai berhasil tidaknya suatu organisasi,

program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Salah satu pengukuran untuk mengetahui efisiensi birokrasi dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan penilaian kinerja APBN khususnya pada instansi pusat, terdapat sistem alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja APBN pada satuan kerja Kementerian dan Lembaga adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA yang diterbitkan Kementerian Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negera atau Lembaga dengan menfokuskan pada prinsip *Value for Money* yaitu Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. (Sijunjung, 2021)

#### 2.1.8 *Value for Money*

*Value for Money* adalah konsep pengukuran kinerja. *Value for money* merupakan indikator kinerja sektor publik, yang menunjukkan apakah pengeluaran anggaran menciptakan nilai tertentu untuk masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi yang melibatkan analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya *input* yang digunakan dengan menghindari biaya yang tidak perlu serta tidak efisien. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan.



Merencanakan *output* yang maksimum dengan *input* yang minimum menunjukkan efisiensi. Sedangkan efektivitas adalah sejauh mana hasil program tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), *Value for Money* merupakan salah satu indikator yang memberitahu apakah pengeluaran anggaran menciptakan nilai tertentu bagi masyarakat atau tidak. Sedangkan menurut Mahmudi (2015), *Value for Money* merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam organisasi sektor publik yang menghargai nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah metrik kinerja yang mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada suatu program kegiatan. Sedangkan menurut Ardila (2015), *value for money* merupakan sebuah konsep yang mengukur kinerja pada suatu organisasi sektor publik tidak hanya pada sudut pandang finansial saja, tetapi dapat terlihat juga pada sudut pandang non-finansial untuk mengukur keberhasilan dari organisasi sektor publik yang aktif.

#### 2.1.9 Indikator *Value for Money*

*Value for money* merupakan suatu konsep untuk mengevaluasi kerja organisasi sektor publik berdasarkan keberhasilan program kerjanya. keberhasilannya didasarkan pada 3 elemen yaitu Ekonomi, Efektivitas dan juga Efisiensi. Melalui konsep ini, mendapatkan informasi yang berupa indikator-indikator yang menunjukkan besarnya dana yang dikeluarkan atau dana yang

dibelanjakan mampu membuat masyarakat sejahtera. Tidak jarang organisasi sektor publik dipandang sebagai pusat inefisiensi, sumber kerugian dan pemborosan modal, sehingga menyebabkan lembaga tersebut mengalami kerugian yang berkepanjangan. Hal ini yang pada akhirnya muncul tuntutan baru bagi organisasi sektor publik untuk mulai memperhatikan *value for money*.

Sebagaimana yang dijelaskan, sebagian orang berpendapat bahwa *Value for Money* merupakan sebuah konsep pengelolaan organisasi di sektor publik yang didasarkan pada 3 elemen utama yaitu: (Kuncoro, 2020)

- Ekonomi

Pada indikator ini, *input* dengan kualitas tertentu diperoleh dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan nilai *input value* dinyatakan dalam satuan moneter. Indikator tersebut berkaitan pada kemampuan organisasi dalam meminimalkan *input resource* yang digunakan. Salah satunya untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

- Efisiensi

Pada indikator ini keuntungan maksimal dicapai dengan *input* yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan *input* terendah untuk mencapai hasil tertentu. Selain itu, efisiensi juga bisa dinilai dari hasil perbandingan jumlah *output* atau *input* yang relatif pada standar kinerja tertentu.

- Efektivitas

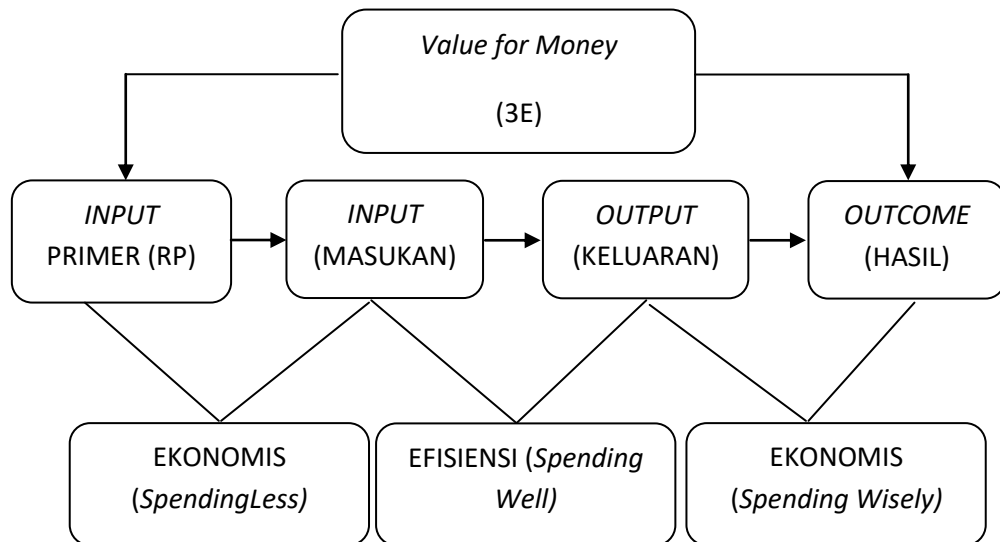
Pada indikator yang terakhir ini dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana hasil dari suatu program dapat dicapai dengan tujuan yang dinyatakan secara sederhana. Pada intinya efektivitas itu perbandingan dari outcome dan output.

#### 2.1.10 Manfaat Implementasi

Penerapan analisis *value for money* diyakini untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik serta meningkatkan kinerjanya. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan yang diberikan disesuaikan secara sempurna.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Mengurangi biaya utilitas karena inefisiensi dan penghematan penggunaan *input*.
- d. Alokasi pengeluaran untuk kepentingan publik, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu.
- e. Meningkatkan kesadaran akan dana publik (*awareness of public cost*) sebagai dasar penerapan akuntabilitas publik.

### 2.1.11 Skematik *Value for Money*



Gambar 1: Skematik Value For Money

Sumber : Mardiasmo

### 2.1.12 Pengukuran *Value for Money*

Pengukuran kinerja finansial serta non-finansial dengan pendekatan *value for money* hanya dapat diukur jika diketahui tingkat *input*, *output* dan *outcome* atau hasilnya. Secara umum, langkah pertama pada organisasi pemerintah merupakan mengidentifikasi *input*, *output*, serta *outcome*. Berdasarkan determinan penentu tersebut, akan diselaraskan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Diagram alur kerja dan nilai pengukuran *value for money* dijelaskan sebagai berikut:

#### a. *Input*

*Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan, program dan kegiatan. Misalnya dokter di rumah sakit, guru di sekolah, polisi di kantor polisi, atau

pegawai di suatu instansi. *Input* diartikan dalam bentuk uang, seperti untuk biaya dokter, gaji guru, bahkan harga tanah.

*b. Output*

*Output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kebijakan; ukuran *output* mewakili hasil pelaksanaan suatu program kegiatannya. Misalnya menciptakan keutamaan hukum dan rasa aman dalam masyarakat. Pentingnya produksi dapat diperkirakan dengan berkurangnya tingkat kejahatan.

*c. Outcome*

*Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan tertentu. *Outcome* yang sering dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan. Contohnya dari jasa kebersihan adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, bersih dan sehat.

Setelah menentukan keberhasilan, langkah selanjutnya adalah menghitung rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah cara mengukurnya dan kriteria yang mendukung pengukuran *value for money*: (Kuncoro, 2020)

a. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi hanya memperhitungkan kualitas *input* yang digunakan. Berikut rumus pengukuran ekonomis sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \text{Input} : \text{Input Value} \times 100\%$$

Gambar 2: Rasio Ekonomi  
Sumber : Kuncoro 2020

Keterangan:

*Input* adalah Realisasi Anggaran

*Input Value* adalah Anggaran

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Ekonomis**

No.	Keterangan Persentase	Kriteria
1.	Kurang Dari 100%	Ekonomis
2.	Sama Dengan 100%	Ekonomis Berimbang
3.	Lebih Dari 100%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kuncoro 2020

Dalam sisi Ekonomi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur ekonomi antara lain:

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari perkiraan organisasi?
- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial dengan baik baik dan maksimal?

Selanjutnya dari pertanyaan diatas dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang telah didapat dari sumbernya dalam rangka untuk mengetahui tingkat ekonominya.

b. Rasio Efisiensi

Pada metode *value for money* indikator ini dikaitkan pada konsep produktifitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan atau biaya produksi. Perlu diketahui bahwa efisiensi merupakan elemen terpenting dari tiga elemen utama *value for money*, karena dibandingkan dengan konsep ekonomi dan efisiensi, efisiensi merupakan bagian dari *value for money* yang dapat diukur dengan perbandingan antara *input* dan *output*. Sementara itu Ekonomis hanya menekankan pada *inputnya* saja dan efektivitas hanya pada *outputnya*. Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Output} : \text{Input} \times 100\%$$

Gambar 3: Rasio Efisiensi  
Sumber : kuncoro 2020

Keterangan:

*Output* adalah hasil dari pencapaian melalui kebijakan program dan aktivitas.

*Input* adalah Realisasi Anggaran

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi**

No.	Keterangan Persentase	Kriteria
1.	Kurang Dari 100%	Tidak Efisiensi
2.	Sama Dengan 100%	Efisiensi Cukup Seimbang
3.	Lebih Dari 100%	Efisiensi

Sumber : Kuncoro 2020

Dalam organisasi sektor publik ini, pengukuran efisiensinya dapat dibandingkan dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan standar belanjanya. Sebelumnya, pengembangan standar belanja harus mempertimbangkan aspek ekonomi serta standar minimum pelayanan publik yang harus dipatuhi.

c. Rasio Efektivitas

Efektivitas dikaitkan pada tercapainya tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Efektivitas sering kali diartikan sebagai hubungan antara suatu hasil dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif apabila mampu dalam mencapai tujuan politik. Penting untuk diingat bahwa efektivitas tidak berhubungan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Namun hal ini dapat dilihat seberapa baik suatu kegiatan atau program tersebut telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Rumus untuk mengukur efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome} : \text{Output} \times 100\%$$

Gambar 4: Rasio Efektivitas

Sumber : Kuncoro 2020

Keterangan:

*Outcome* adalah Dampak dari Suatu Kegiatan

*Output* adalah Hasil yang Dicapai oleh Kebijakan Suatu Program.



**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efektitas**

No.	Keterangan Persentase	Kriteria
1.	Kurang Dari 100%	Tidak Efektif
2.	Sama Dengan 100%	Efektivitas Cukup Seimbang
3.	Lebih Dari 100%	Sangat Efektif

Sumber : Kuncoro 2020

Apabila suatu organisasi sektor publik telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan maka organisasi tersebut bisa dikatakan efektif.

## 2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Lussiana dkk (2019) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui Integritas Sistem Informasi Keuangan” bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dengan mendorong peningkatan kinerja organisasi. Data yang diperoleh dari informan kemudian disajikan dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Aspek transparansi dijamin dengan merilis seluruh laporan kepada publik. Akuntabilitas dicapai melalui kepatuhan terhadap kontrak kinerja dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Standar Biaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. (Lusiana dkk., 2019).

Pada penelitian Ramadhani (2022) yang berjudul “Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemakaman” dengan tujuan untuk mengetahui penerapan analisis *value for money* dalam LAKIP Dinas Sosial berdasarkan tingkat

ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan menggambarkan tentang analisis data yang diterima dari Dinas Sosial berupa data jumlah anggaran, pelaksanaan anggaran, hasil actual yang saat ini dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga dapat dicantumkan daftarnya dengan cukup jelas. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada LAKIP Dinas Sosial tahun 2019 & 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*. (Ramadhani, 2022).

Pada Penelitian Melinda (2022) yang berjudul “Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas komunikasi, Informasi dan Statistika” dengan tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dengan prinsip Value for Money. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang dihasilkan adalah LAKIP dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 & 2020. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dilihat dari tiga elemen utama yaitu: Ekonomis, Efektivitas dan Efisiensi dalam konsep Value for Money belum mencapai hasil yang maksimal atau belum memenuhi prinsip *value for money*. (Melinda, 2022).

Pada penelitian Rahman (2021) yang berjudul “Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral” bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan Dinas ESDM pada tahun 2017 - 2019 dengan menggunakan *value for money*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas ESDM ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas ESDM pada Rasio Ekonomis 2017-2019 sudah baik, namun hasil sisi Rasio Efisiensi maupun Rasio Efektivitasnya belum bisa dianggap sebagai kinerja yang efektif dan efisien. (Rahman, 2021).

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh, kemudian menyusun dan menganalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan pada masalah untuk menarik kesimpulan dan saran. Penelitian dilakukan sesuai dengan lokasi Praktek Kerja Lapangan yaitu di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU.

#### **3.2 Lokasi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 53 Pemali Comal, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52112 (Bpsda\_PC, t.t.).

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang dapat langsung diukur dan dihitung dalam bentuk numerik. (*Data Kuantitatif*, 2023).

##### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (Abdillah, 2023).

- a. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara apapun.
- b. Data sekunder merupakan suatu data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber primer.

### 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu jenis analisis data untuk mendeskripsikan, menampilkan, dan merangkum sekumpulan data yang telah diperoleh. (*Analisis Deskriptif*, 2023).

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menurut jenisnya antara lain:

#### a. Metode Wawancara

Metode ini meliputi pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan seperti staf Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU (“Metode Wawancara,” 2023).

#### b. Metode Observasi

Metode pengumpulan data ini meliputi pengamatan langsung terhadap subjek yang sedang diteliti, pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, dan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berwenang mengenai data yang diperoleh dianggap relevan. Dalam penelitian ini pengamatan langsung pada Dinas PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU. (*Metode Observasi*, 2023).

### c. Studi Pustaka

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari teori atau konsep yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas dalam buku, literature atau artikel yang berkaitan dengan akuntansi, serta dengan mengunjungi website yang menyediakan informasi mengenai topic tersebut. Pada hal ini, untuk mendapatkan teori yang dapat memadai untuk melakukan pembahasan. (*Studi Pustaka, 2023*).

#### 3.3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja anggaran dengan menggunakan konsep *value for money* yang mempertimbangkan 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi serta efektivitas. Pengukuran tersebut akan ditafsirkan hasil perhitungannya, kemudian melanjutkan menganalisis dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah informasi tersebut dapat diakses oleh semua orang, apakah semua kinerjanya bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan tertentu dan apakah kinerja anggaran Dinas PSDA Pemali Comal sudah baik atau belum (Ganjar & Nugraha, 2022).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

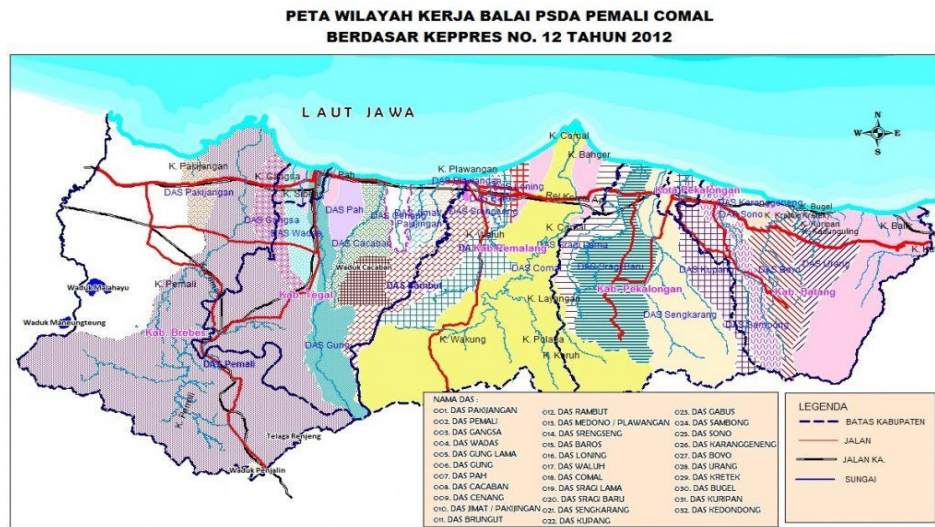
#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dinas PUSDATARU) didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Potensi SDA Provinsi Jawa Tengah meliputi 128 sungai, memiliki panjang 4.116,89 km, memiliki 38 waduk, memiliki 172 embung, dan memiliki 602 aliran mata air. Potensi air permukaan sebesar 65,812 miliar m<sup>3</sup>/tahun, potensi air sungai sebesar 682 juta m<sup>3</sup>/tahun, dan potensi air sungai utama 65,13 miliar m<sup>3</sup>/tahun. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 12,786 miliar m<sup>3</sup>/tahun atau setara dengan 20% tidak dimanfaatkan dan terbuang ke laut 53,03 miliar m<sup>3</sup>, atau setara dengan 80% luas sawah yang terlayani jaringan irigasi termasuk menutup suatu wilayah seluas 992,455 hektar atau sebanyak 9.127 keliling irigasi, termasuk 39 keliling irugasi seluas 346.998 hektar berada dibawah kewenangan pusat, 106 jalur irigasi seluas 86.252 hektar berada dibawah wewenang provinsi, dan 8.982 jalur irigasi seluas 559.206 hektar berada dibawah wewenang kabupaten maupun kota. (*Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah*).

Adapun balai atau kantor induk pada Dinas PUSDATARU adalah Balai PSDA Pemali Comal. Balai PSDA merupakan perpanjangan tangan dari Dinas PSDA Provinsi di Daerah itu sendiri, salah satunya ada di Daerah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.544,12 m<sup>2</sup> dan mempunyai 97 Daerah Aliran Sungai terbagi dalam 35 kabupaten maupun kota. Sebagian besar wilayah sungai di Jawa Tengah merupakan wilayah sungai lintas kabupaten maupun kota. Untuk mendekatkan, memperlancar koordinasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Jawa Tengah, telah didirikan 6 Balai PSDA, antara lain Balai PSDA Pemali Comal dengan wilayah kerja antara lain Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kota Tegal, dan Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Zonasi Sungai.

Wilayah sungai Pemali Comal meliputi 32 wilayah sungai dengan wilayah kerja PSDA Pemali Comal seluas 3579,36 km<sup>2</sup>. Balai PSDA didirikan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan bantuan teknis di bawah wewenang pemerintah provinsi. Balai PSDA Pemali Comal terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Pemali Comal Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah 52112. (Bpsda\_PC, t.t.).





Gambar 5 : Wilayah Kerja Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU  
Sumber : Balai PSDA PC Dinas PUSDATARU

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU memiliki visi yaitu “Terwujudnya pelayanan pengelolaan sumber daya air yang optimal dan Berkelanjutan untuk kemanfaatan masyarakat agar semakin sejahtera”.

Selain Visi, Balai PSDA Dinas PUSDATARU juga memiliki 5 misi yaitu:

- 1) Melaksanakan dan memantau kegiatan konservasi SDA secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan serta konservasi infrastruktur dan fungsi terkait dengan SDA.
- 3) Meminimalkan dampak adanya kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber produksi.
- 4) Menerapkan sistem pengelolaan air yang secara optimal, terpadu serta berkelanjutan.

- 5) Melaksanakan pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk masyarakat memenuhi beragam kebutuhan daerah dan kepentingan.

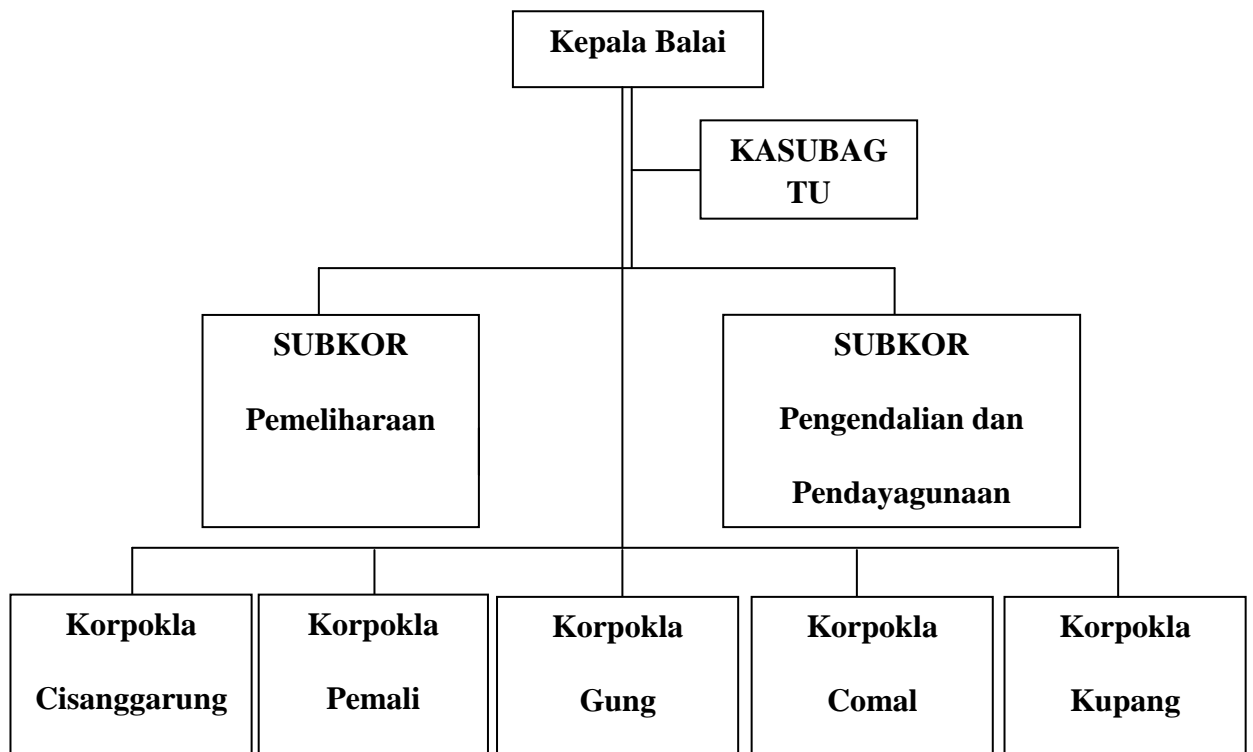
Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan menunjang kegiatan teknis pada bidang pengelolaan SDA. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU menyelenggarakan 5 fungsi, yaitu:

1. Menyusun perencanaan operasional teknis untuk pengaturan, mengalokasikan, menyediakan air serta sumber air, memelihara, mengendalikan serta menggunakan SDA.
2. Melaksanakan kebijakan teknis mengenai pengoperasian, pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber daya air, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan SDA.
4. Pengelolaan ketatausahaan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

## 4.2 Struktuk Organisasi

### Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

#### Dinas PUSDATARU



Gambar 6 : Struktur Organisasi BPSDA PC Dinas PUSDATARU

Sumber : Balai PSDA PC Dinas PUSDATARU

## 4.3 Transparansi

Organisasi sektor publik hendaknya memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan atau pelaksanaan suatu program kegiatan yang ada di organisasi sektor publik kepada masyarakat setempat atau masyarakat sekitar kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang

membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengambil keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, Ardianto (2017) juga berpendapat transparansi adalah keterbukaan yang serius dan menyeluruh, yang menjadi landasan bagi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, transparansi juga dikemukakan memiliki indikator antara lain keterbukaan kerangka anggaran, khususnya dalam proses penganggaran, publikasi setiap kebijakan anggaran, adanya dokumen anggaran yang memuat beberapa pedoman keuangan, keterbukaan informasi mengenai belanja actual, adanya keterbukaan pada saat penyusunan anggaran, serta kemungkinan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. (Sangki dkk.).

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU merupakan organisasi sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek transparansi di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dapat dilihat dari berbagai kegiatannya. Adapula pernyataan dari Kepala Bendahara APBD yang bernama Sri Farikhatun, Sekertaris APBD yang bernama Darsono dan Pegawai Bendahara APBD yang bernama Ferdian Romadhoni menyatakan bahwa pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat setempat dan setiap adanya kegiatan konstruksi dilapangan yang ada hubungannya dengan pemeliharaan saluran, embung, bendungan rawa-rawa, sungai yang berwilayahan sekitar

Pemali Comal akan dipasang papan realisasi pekerjaan dengan itu masyarakat merasa bahwa RAB sudah sesuai yang telah ditentukan.

#### **4.4 Akuntabilitas**

Institute publik harus mampu bertanggung jawab atas kebijakan yang diidentifikasi, dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Dalam menyusun kebijakan, perlu mempertimbangkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan untuk menjamin akuntabilitas kinerja bertanggungjawab atas efektif dan efisiensinya pengelolaan program operasional kantor. Dimensi akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul, 2002, menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki lima dimensi diantaranya adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas manajemen, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Sangki dkk.).

Di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dalam proses penyiapan pelaksanaan anggaran APBD menyebutkan dasar hukum APBD adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Daerah serta Tata Cara Pemantauan, Penetapan dan Perhitungan APBD. Selain itu, Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah lembaga penyelenggara urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah berdasarkan otonomi daerah. (“Pemerintahan daerah,” 2023).

Penyusunan APBD yang terlibat adalah Kepala Bendahara APBD dibantu oleh Tim Pegawai APBD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya antara lain:

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyiapkan dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rencana revisi Kebijakan Umum APBD.
- c. Mempersiapkan dan mendiskusikan rencana Prioritas Plafon Anggaran Semestara (PPAS) dan rencana perubahan PPAS.
- d. Membahas rancangan APBD, Usulan perubahan APBD serta usulan pertanggungjawaban APBD.
- e. Membahas hasil peninjauan APBD, perubahan APBD, serta pertanggungjawaban APBD.
- f. Melakukan RKA APBD
- g. Memverifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.

- h. Menyiapkan surat edaran dari kepala daerah mengenai petunjuk persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penetapan waktu APBD pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU harus dilakukan tepat waktu karena sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah dan DPRD harus menyetujui rancangan pemerintah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya anggaran berikutnya.

Perencanaan dan penggunaan anggaran pada Balai PSDA Comal Dinas PUSDATARU sudah sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan penggunaan pada suatu pelaksanaan selalu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi yang dipasang pada papan realisasi kegiatannya. Bentuk laporan APBD pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK.

#### **4.5 Analisis Data**

Pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU memiliki program-program kegiatan tahunan. Setiap program menuntut untuk kegiatan

yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Didalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah, Balai PSDA Comal Dinas PUSDATARU terdapat beberapa kegiatan, antara lain:

**Tabel 4. 1**  
**Program dan Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Program Pengelolaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</li> <li>- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air</li> <li>- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</li> <li>- Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</li> </ul>
2.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3.	Program Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Meyurat</li> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas</li> <li>- Mengkoordinasikan dan berkonsultasi pertemuan di dalam dan di luar Kantor</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga</li> </ul>
--	--	---

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Balai PSDA PC TA 2021

Program PSDA memiliki 4 kegiatan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 1 kegiatan dan Program Administrasi memiliki 12 kegiatan. Adapun program kegiatan pada tahun 2022 yang dijalankan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU yaitu:

**Tabel 4. 2**  
**Program dan Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2022**

No.	Nama Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik</li> </ul>

		Daerah
2.	Program PSDA	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi
3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Balai PSDA PC TA 2022

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 kegiatan, Program PSDA memiliki 2 kegiatan dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Memiliki 1 kegiatan.

*Value for Money* merupakan konsep evaluasi kerja dimana organisasi sektor publik dinilai berdasarkan keberhasilan program kerjanya. Keberhasilan tersebut mengacu pada 3 elemen utama *Value for Money*, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Rasio Ekonomi adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga terendah, rasio ini merupakan perbandingan antara *input* atau realisasi anggaran dan *input value* atau anggaran yang dinyatakan pada satuan moneter. Rasio ini berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak efisien. Pada dasarnya pengukuran rasio ekonomis ini hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan (Ganjar & Nugraha, 2022a).

Berikut adalah perhitungan elemen ekonomis setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2021**

No	Nama Program	Kegiatan	Input (Rp)	Input Value (Rp)	Ekonomis
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.030.409.350	6.095.318.000	98,94%
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air	626.113.000	646.347.000	96,87%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	4.216.373.700	4.241.111.000	99,42%
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan	1.063.067.000	1.067.389.000	99,60%

2.	Penyenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	62.243.000	62.829.000	99,07%
3.	Program Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.176.000	1.176.000	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.141.000	20.392.000	98,77%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.753.000	11.753.000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.834.681	180.720,000	77,38%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	34.450.000	34.500.000	99,86%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan diluar Daerah	9.580.000	9.936.000	96,42%
		Penyediaan Makanan dan	1.759.400	1.760.000	99,97%

		Minuman Rapat			
		Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	600.000	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	20.000.000	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	33.589.000	33.600.000	99,97%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	46.615.000	47.370.000	98,41%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala	33.265.000	33.423.000	99,53%

		Sarana Kantor dan Rumah Tangga			
--	--	--------------------------------	--	--	--

Sumber : Data Olahan Ekonomis 2021

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.3 diatas, bahwa rasio ekonomis pada tahun 2021 yaitu terdapat 13 kegiatan nilai ekonomis dengan perbandingan nilai yang angkanya kurang dari 100% dan 4 kegiatan ekonomis berimbang dengan nilai sama dengan 100%.

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan perhitungan ekonomis pada Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah perhitungan elemen ekonomis setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai PSDA Pemali Comaal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2022**

No	Nama Program	Kegiatan	Input (Rp)	Input Value (Rp)	Ekonomis
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.440.575	24.780.000	98,63%
		Penyediaan Barang Cetakan	17.648.000	17.648.000	100%

		dan Pengganda an			
		Penyediaa n Barang Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	2.691.000	2.760.000	97,50%%
		Fasilitas Kunjunga n Tamu	8.100.000	8.280.000	97,83%
		Penyeleng graan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	27.371.500	29.800.000	91,85%
		Penyediaa an Jasa Surat Menyurat	1.176.000	1.176.000	100%
		Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	170.701.531	206.904.000	82,50%
		Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.400.003	34.500.000	99,71%
		Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar	98.324.276	102.164.000	96,24%

		aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.943.000	118.666.000	99,39%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.310.330	80.828.000	96,89%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air	665.439.575	670.065.000	97,99%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan	7.306.416.995	7.372.351.000	99,11%



		Tebing Sungai			
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.253.502.400	1.262.091.000	99,32%
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.539.821.590	6.779.124.000	96,47%
3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	96.405.710	97.638.000	98,74%

Sumber : Data Olahan Ekonomis 2022

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.4 diatas, bahwa rasio ekonomis tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan dengan nilai ekonomis yang nilai perbandingannya kurang dari 100% dan 2 kegiatan ekonomis berimbang dengan nilai sama dengan 100%.

Elemen kedua dari *Value For Money* adalah Efisiensi. Efisiensi dalam metode ini menggunakan perbandingan antara *output* (hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan program) dan *input* (anggaran). Suatu proses operasional bisa dikatakan efisiensi jika suatu produk atau hasil pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan sumber daya serta pengeluaran seminimal mungkin. (Ganjar & Nugraha, 2022).

Berikut perhitungan elemen efisiensi setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2021**

No	Nama Program	Kegiatan	Output	Input	Efisiensi
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	100%	98,94%	101%
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air	100%	96,87%	103%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100%	99,42%	105%
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan	100%	99,60%	104%
2.	Penyelenggaraan	Koordinasi Pelaksanaan	100%	99,07%	109%

	Penataan Ruang	Penataan Ruang			
3.	Program Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	98,77%	101%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	77,38%	129%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	100%	99,86%	101%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan diluar Daerah	100%	96,42%	103%
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	100%	99,97%	101%
		Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	99,97%	101%

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	98,41%	101%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	100%	99,53%	104%

Sumber : Data Olehan Efisiensi 2021

Berdasarkan analisis data tabel 4.5 diatas, bahwa rasio efisiensi pada tahun 2022 yaitu terdapat 13 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi dengan perbandingan yang diperoleh lebih dari 100% dan terdapat 4 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi Cukup Seimbang dengan perbandingan yang diperoleh sama dengan 100%.

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan perhitungan Efisiensi pada Tahun Anggaran 2022. Berikut perhitungan elemen efisiensi setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2022**

No	Nama Program	Kegiatan	Output	Input	Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,63%	101%
		Penyediaan	100%	100%	100%

	Barang Cetakan dan Penggandaan			
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	97,50%	102%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	97,83%	102%
	Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	91,85%	108%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	82,50%	121% %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	99,71%	102%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	96,24%	103%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,39%	101%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	96,89%	103%

		dan Bangunan Lainnya			
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air	100%	97,99%	102%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	99,55%	99,11%	104%
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	100%	99,34%	101%
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	99,29%	96,47%	102%
3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100%	98,74%	101%

Sumber : Data Olahan Efisiensi 2022

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.6 diatas, bahwa rasio efisiensi tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi dengan perbandingan yang diperoleh lebih dari 100%. Sedangkan 2 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi Cukup Seimbang dengan Perbandingan yang diperoleh sama dengan 100%.

Elemen yang ketiga dari *Value For Money* adalah Efektifitas. Hal ini, pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan.

Pada elemen ketiga ini terdapat keterkaitan antara hasil dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. (Ganjar & Nugraha, 2022).

Berikut perhitungan elemen efektivitas setiap program kegiatan yang dilaksanakan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2021**

No	Nama Program	Kegiatan	Outcome	Output	Efektivitas
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	100%	100%	100%
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air	100%	100%	100%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100%	100%	100%
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan	100%	100%	100%
2.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	100%	100%
3.	Program Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%

		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	100%	100%	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan diluar Daerah	100%	100%	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	100%	100%	100%
		Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%



		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	100%	100%	100%

Sumber : Data Olahan Efektivitas 2021

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.7 diatas, bahwa rasio efektivitas pada tahun 2021 yaitu semua kegiatan atau 17 Kegiatan masing-masing kegiatan memiliki nilai Efektivitas Cukup Seimbang karena dengan nilai perbandingan yang diperoleh sama dengan 100%.

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan perhitungan Efisiensi pada Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah perhitungan elemen efektivitas setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal**  
**Dinas PUSDATARU**  
**Tahun 2022**

No	Nama Program	Kegiatan	Outcome	Output	Efektivitas
1.	Program Penunjang Urusan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	100%

Pemerintah Daerah	Kantor			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100%	100%	100%

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan			
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air	100%	100%	100%
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100%	99,55%	101%
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	100%	100%	100%
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100%	99,29%	102%

3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100%	100%	100%
----	--	--	------	------	------

Sumber : Data Olahan Efektivitas 2022

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.8 diatas, bahwa rasio efektivitas pada tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan yang memiliki nilai Efektivitas Cukup Seimbang dengan nilai perbandingan yang diperoleh dari 100%, dan 2 kegiatan yang memiliki nilai Sangat Efektivitas dengan nilai perbandingan yang diperoleh 100%.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Analisis *Value for Money* pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Ekonomis

Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah bisa dikatakan transparan, serta dilihat dari akuntabilitas sudah memenuhi pertanggungjawabannya sedangkan dilihat dari kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah di anggarkan, hal tersebut terlihat jelas pada perhitungan rasio ekonomi tahun 2021 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat perhitungan yang paling terkecil khususnya pada program kegiatan penyediaan jasa komunikasi dan SDA dan listrik dengan angka persentase 77,38%.

Adapula 4 kegiatan dengan perhitungan tertinggi sebesar 100% pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional.

Sedangkan berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah dikatakan transparan, serta akuntabilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya sedangkan dilihat dari kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan, hal ini terlihat jelas melalui perhitungan rasio ekonomis tahun 2022 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU serta perhitungan yang paling kecil sebesar 82,50% yaitu pada penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik. Ada 2 kegiatan yang perhitungan rasio tertinggi yaitu 100% diantaranya adalah penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyediaan jasa surat menyurat,

Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio ekonomis pada tahun 2021 yang berkonsep *value for money* pada program kegiatan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU termasuk dalam kategori ekonomis, karena hal ini menunjukkan bahwa anggaran dan realisasinya pada tahun 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dan bisa dikatakan sebagai ekonomis. Sedangkan di tahun 2022 juga sudah dikatakan sebagai ekonomis karena anggaran dan realisasinya sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang

diterima dan diolah, Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU mampu menggunakan anggaran secara baik dan ekonomis, serta kemampuan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dalam mengelola keuangannya. Sehingga seluruh program kegiatan yang berlangsung sesuai rencana yang ditetapkan.

#### **4.6.2 Analisis *Value for Money* pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efisiensi**

Berdasarkan dari ketiga program kegiatannya dilihat dari rasio efisiensinya antara *output* atau hasil dari pencapaian melalui kebijakan operasional program dan *input* atau realisasi anggaran pada perhitungan rasio efisien tahun 2021 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat perhitungan paling terkecil dengan persentase 100% pada 4 kegiatan diantaranya yaitu jasa surat menyurat, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan rutin/berkala, rumah dinas/gedung kantor, kendaraan dinas/operasional. Serta terdapat perhitungan paling tertinggi sebesar 129% pada program kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik.

Sedangkan pada perhitungan rasio efisiensi tahun 2022 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU juga terdapat 2 kegiatan dengan perhitungan yang paling kecil sebesar 100% diantaranya yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyediaan jasa

surat menyurat. dan adapula perhitungan yang tertinggi dengan persentase 121% yaitu pada kegiatan jasa komunikasi sumber, SDA dan listrik.

Maka Berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2021 dan 2022 pada program kegiatan Balai PSDA Comal Dinas PUSDATARU sudah dikatakan baik karena sudah sesuai dengan konsep efisiensi sehingga hasil dari pencapaian melalui kebijakan program aktivitas dan realisasi anggarannya sudah efisien karena nilai perbandingannya menunjukkan lebih dari 100%.

#### **4.6.3 Analisis *Value for Money* pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efektivitas**

Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah dikatakan transparan, serta akuntabilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara *outcome* atau dampak dari suatu kegiatan dan *output* atau hasil yang dicapai oleh kebijakan suatu program kegiatan, dilihat dari perhitungan rasio efektivitas di tahun 2021 pada Balai PSDA Dinas PUSDATARU terdapat 17 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan perbandingan sama dengan 100%.

Sedangkan pada perhitungan rasio efektivitas di tahun 2022 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat 12 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan perbandingan nilai

persentase sama dengan 100% dan 2 kegiatan dengan nilai sangat efektif dengan persentase nilai lebih dari 100% diantaranya adalah operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio efektivitas tahun 2021 & 2022 pada program kegiatan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dapat dikatakan baik karena dampak dari suatu kegiatan dan hasil yang dicapai. Yang diperoleh dari kebijakan suatu program kerja dikatakan efektivitas cukup seimbang karena dengan nilai perbandingan sama dengan 100%, serta pada tahun 2022 juga terdapat 2 kegiatan yang dikatakan sangat efektivitas karena dengan nilai perbandingan yang lebih dari 100%.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dapat disimpulkan bahwa Transparan, Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* melalui 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas adalah:

- a. Berdasarkan program kerjanya sudah dikatakan transparans, serta akuntabilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini terlihat jelas dari rasio ekonomisnya tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa kinerja anggarannya dengan realisasinya sudah dikatakan ekonomis sebab perhitungan nilai yang diperoleh kurang dari 100%.
- b. Berdasarkan dari ketiga Program kerjanya sudah dikatakan transparans, serta akuntabilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan, hal ini dilihat pada rasio efisiensinya pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa hasil dari pencapaian melalui program kerjanya dan realisasinya sudah dikatakan efisiensi cukup seimbang dan efisien karena dengan nilai perbandingan sama dengan 100% dan lebih dari 100%.

- c. Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah dikatakan transparan, serta akuntabilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan, hal ini dilihat pada perhitungan rasio efektivitas di tahun 2021 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat 17 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan perbandingan nilai sama dengan 100%. Sedangkan tahun 2022 terdapat 12 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan tingkat perbandingan sama dengan 100% dan 2 kegiatan dengan nilai sangat efektif dengan perbandingan nilai lebih dari 100%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU memberi saran bahwa:

- a. Instansi
  1. Selain itu, perlu adanya penguatan sosialisasi anggaran agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan memahami proses pelaksanaannya.
  2. Selain itu juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan *output* dan *inputnya* karena tingkat efisiensi sangat bergantung pada tingkat *output* program kegiatan yang dihasilkan. Semakin tinggi *output* maka semakin tinggi pula tingkat efisiensinya. Dan jika realisasi

kinerja anggaran yang semakin tinggi maka tingkat efektivitasnya pun akan semakin meningkat.

b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih baik meneliti dan memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan yang sedang terjadi pada subjek penelitian yang akan diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2023, Agustus 4). *Data Primer dan Data Sekunder—Pengertian, Kualitatif & Kuantitatif*. RumusRumus.Com. <https://rumusrumus.com/data-primer-dan-data-sekunder/>
- AKUNTABILITAS: MENUJU INDONESIA BERKINERJA. (t.t.). Diambil 29 Maret 2023, dari <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja>
- Apa itu Analisis Deskriptif? Pengertian dan contoh 2023 | RevoU. (t.t.). Diambil 21 Agustus 2023, dari <https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif>
- Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. (t.t.). Diambil 1 Februari 2023, dari <https://bagumumkeu.bojonegorokab.go.id/berita/baca/18>
- Bpsda\_PC. (t.t.). Sejarah. BALAI PSDA PEMALI COMAL. Diambil 31 Januari 2023, dari <https://bpsdataru-pc.jatengprov.go.id/sejarah/>
- Data Kuantitatif: Pengertian, Jenis & Metode Pengumpulannya. (2023, April 14). <https://bitlabs.id/blog/data-kuantitatif-adalah/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (2015, November 21). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>
- Dwi Purwanti. (2017). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi*.
- ganjar, & Nugraha, G. (2022a, Maret 25). *Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya*. Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/>
- ganjar, & Nugraha, G. (2022b, Maret 25). *Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya*. Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/>
- Hasan, W. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Accounting Journal*, 1, 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v1i1.67>
- Ir Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya A. (t.t.). Diambil 6 Juli 2023, dari <https://pusdataru.jatengprov.go.id/>
- Kuncoro, H. (2020, Desember 26). Value for Money; Definisi, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran. *Jojonomic | Aplikasi HRIS, Human Capital & Expense Management*. <https://www.jojonomic.com/blog/value-for-money/>
- Lusiana, Mildawati, T., & Fidiana. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui Integrasi Sistem Informasi Keuangan. *Journal of research and application: accounting and management*, 4(1). <https://doi.org/10.18382/jraam.v4i1.001>

- Melinda, M. (2022). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/16690/>
- Metode Observasi—Pengertian, Macam dan Contohnya.* (t.t.). Diambil 21 Agustus 2023, dari <https://rumusrumus.com/metode-observasi/>
- Metode Wawancara: Pengertian, Jenis Metode, dan Contohnya.* (2023, Maret 30). *Ruang Jurnal.* <https://ruangjurnal.com/metode-wawancara/>
- Nina Rosalin Siahaan.pdf.* (t.t.). Diambil 21 Mei 2023, dari <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1233/Nina%20Rosalin%20Siahaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nurlindiana. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBD.*
- Pemerintahan daerah. (2023). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.* [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintahan\\_daerah&oldid=23606737](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintahan_daerah&oldid=23606737)
- Rahman, W. A. (2021). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/5957/>
- Ramadhani, R. (2022). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/12876/>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (t.t.-a). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).*
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (t.t.-b). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).*
- Sijunjung, R. K. (2021, Mei 19). *PERANAN IKPA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BIROKRASI.* <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/2866-peranan-ikpa-dalam-pelaksanaan-anggaran-birokrasi.html>
- Studi Pustaka Adalah: Pengertian, Fungsi, Proses, dan Jenisnya.* (t.t.). Diambil 21 Agustus 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Pertanyaan yang akan diajukan kemungkinan dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan narasumber nantinya. Adapun narasumber yang akan diwawancarai diantaranya Kepala Bendahara APBD, Sekertaris APBD dan Pegawai Bendahara APBD (Nurlindiana, 2021)

##### **A. Transparansi**

2. Bagaimana di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pemali Comal ini dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat!
3. Bagaimana cara menyakinkan masyarakat laporan realisasi APBD jauh dari kecurangan, pemborosan dana!
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap informasi keuangan yang telah dilaporkan!

##### **B. Akuntabilitas**

1. Apakah ada dasar hukum dalam menyusun Laporan APBD?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun Laporan APBD?
3. Apakah Laporan APBD dapat diselesaikan dengan tepat waktu?

##### **C. Kinerja Anggaran**

1. Apa dasar hukum perencanaan APBD?

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD!
3. Berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari awal perencanaan sampai akhir perencanaan!
4. Apakah sudah sesuai antara perencanaan dan penggunaan anggaran?
5. Apakah penggunaan anggaran pada suatu pelaksanaan selalu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah?
6. Bagaimana bentuk pelaporan APBD?
7. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban APBD?
8. Apa saja faktor yang menghambat proses penyusunan kinerja anggaran!
9. Selama tahap realisasi anggaran, bagaimana kegiatan dalam pencairan anggrannya!

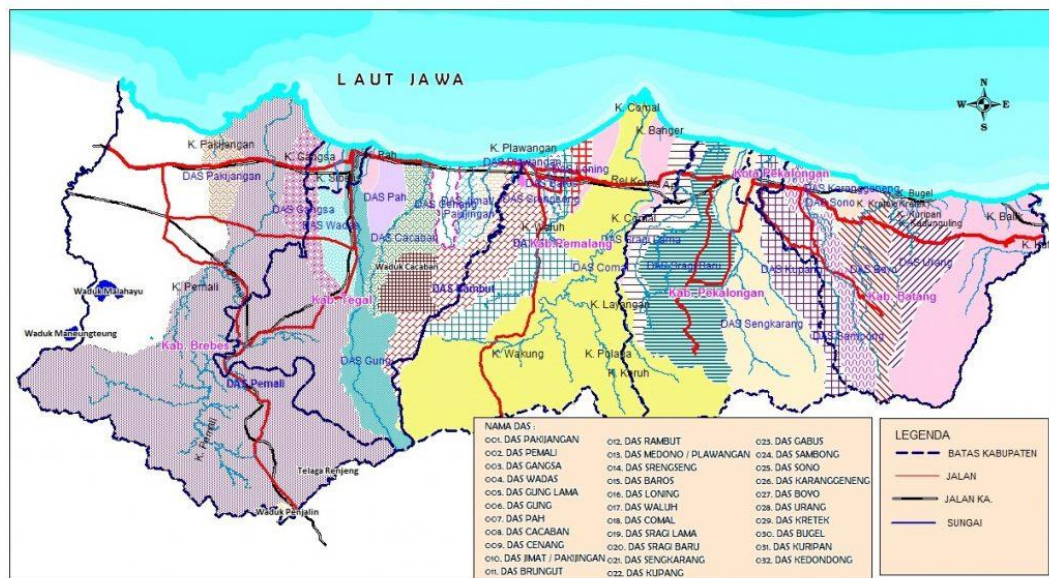
#### **D. Konsep *Value for Money***

1. Apakah sisa anggaran tahun sebelumnya dapat dijadikan sumber penerimaan untuk tahun berikutnya?
2. Apakah input sudah digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program maupun aktivitas yang semsetinya?
3. Bagaimana penggunaan output di organisasi? Apakah penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan?
4. Apakah ada pemakaian dana output lebih yang tidak terpakai?
5. Apakah ada dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari target yang telah ditetapkan?

6. Apa yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang sudah ditentukan?

**Lampiran 2 Wilayah Kerja BPSDA PC Dinas PUSDATARU**

**PETA WILAYAH KERJA BALAI PSDA PEMALI COMAL  
BERDASAR KEPPRES NO. 12 TAHUN 2012**



Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU

**Lampiran 3 Hasil Wawancara Pihak BPSDA PC Dinas PUSDATARU**

Kepala APBD : Sri Farikhatun

Bendahara APBD : Darsono

Pegawai APBD : Romadhoni

Peneliti	Responden
<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat</p>	<p>Setiap ada pekerjaan konstruksi dilapangan yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran, waduk, sungai, rawa-rawa, embung, bendungan akan</p>



	dipasang papan realisasi pekerjaan.
Bagaimana meyakinkan masyarakat atas laporan realisasi APBD	Sebelum pelaksanaan pekerjaan mengadakan sosialisasi pada masyarakat setempat.
Tanggapan masyarakat terhadap informasi keuangan yang telah dilaporkan	Masyarakat merasa senang sebab pelaksanaannya sudah sesuai dengan RAB yang telah ditentukan.
Apakah ada dasar hukum dalam penyusunan APBD di Balai PSDA PC Dinas PUSDATARU ini?	Ada, Penyusunan APBD mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman-pedoman pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dan siapa saja yang terlibat.	Dalam penyusunan sudah ditetapkan pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rencana Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan. Disini yang Terlibat, Kepala bendahara APBD dibantu dengan pegawai APBD.
Apakah input sudah digunakan untuk	Alhamdulillah sudah, malah anggaran

pelaksanaan suatu kegiatan program maupun aktivitas yang semestinya	dan realisasinya digunakannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
Bagaimana penggunaan outputnya	Penggunaannya diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan.
Apakah ada pemakaian dana output lebih dari yang tidak terpakai	Tidak ada, karena setiap realisasi keuangan harus ada bukti realisasi fisiknya.

### Lampiran 4 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 dan 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
S/D AKHIR BULAN DESEMBER

SKPD : DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH  
UNSIK BELANJA : BALAI PSDA PEMALI COMAL  
DESEMBER

RFK - 15

REK	KODE FISKAL	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TRACER KEGIATAN (OUT PUT) TAKHIR	REALISASI S/D AKHIR BULAN INI	JUMLAH FAKSI ANGGARAN	KEUANGAN						FISIK			PERKALAHAN BUKTI PEKERJAANNYA	
						REK KUMULATIF S/D AKHIR BULAN INI	SD AKHIR BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	SD AKHIR BULAN INI	DEViasi	REK KUMULATIF S/D AKHIR BULAN INI	REALISASI BULAN INI	DEViasi			
1	2	3	4	5	6	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)	18	
A		<b>SEKSI 0 DAN P</b>				12.050.165.000	100,00	11.385.943.050	550.020.000	11.935.963.050	99,05	-0,95	100,00	100,00	0,00	
1	02	<b>Program Pengalokasian Sumber Daya Air</b>				6.095.318.000	100,00	5.840.929.330	389.480.000	6.030.409.330	98,94	-1,06	100,00	100,00	0,00	
	02	21 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman	13 02 dan TK PIGDA 16.471 Ha. kat. Rendah, Tinggi Rendah, Perumahan, Bawang	25 Ksp Pengukuran Apungan		6.095.318.000	100,00	5.640.929.350	389.480.000	6.030.409.350	98,94	-1,06	100,00	100,00	0,00	
		- Belanja Barang				491.588.000		476.294.350	4.000.000	484.576.350						
		- Belanja Jasa				3.871.650.000		3.440.110.000	377.850.000	3.818.000.000						
		- Belanja Pemeliharaan				1.804.000.000		1.602.625.000	-	1.602.625.000						
		- Belanja Perjalanan Dinas				128.580.000		121.650.000	3.560.000	125.210.000						
	01	<b>Program Pengalokasian Sumber Daya Air</b>				5.954.847.000	100,00	5.745.013.700	160.540.000	5.905.553.700	99,17	-0,83	100,00	100,00	0,00	
	01	49 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Persempitan Air Lainnya	4 Irigasi - kat. Rendah, Tinggi Rendah, Perumahan, Bawang			646.347.000	100,00	596.863.000	29.250.000	626.113.000	96,87	-3,13	100,00	100,00	0,00	
		- Belanja Barang				11.537.000		29.809.000	-	29.809.000						
		- Belanja Jasa				330.750.000		281.625.000	29.250.000	312.875.000						
		- Belanja Pemeliharaan				267.000.000		266.720.000	-	266.720.000						
		- Belanja Perjalanan Dinas				17.070.000		16.650.000	-	16.650.000						
	01	53 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Terasir Sungai	12 Irigasi - kat. Rendah, Tinggi Rendah, Perumahan, Bawang			4.241.111.000	100,00	4.148.173.700	68.200.000	4.216.373.700	99,42	-0,58	100,00	100,00	0,00	
		- Belanja Barang				441.971.000		428.535.700	1.500.000	430.035.700						
		- Belanja Jasa				641.700.000		574.940.000	66.700.000	640.740.000						
		- Belanja Pemeliharaan				3.031.000.000		3.028.724.000	-	3.028.724.000						
		- Belanja Perjalanan Dinas				118.440.000		116.884.000	-	116.884.000						
		- Belanja Barang diberikan kepada masyarakat				6.000.000		-	-	-						
	01	53 Kegiatan Pengalokasian Hidrologi dan Kualitas Air WQ Kabupaten/Provinsi	12 Irigasi - kat. Rendah, Tinggi Rendah, Perumahan, Bawang			1.067.389.000	100,00	999.977.000	63.950.000	1.063.067.000	99,60	-0,40	100,00	100,00	0,00	
		- Belanja Barang				210.339.000		207.555.000	-	207.555.000						
		- Belanja Jasa				591.100.000		528.851.000	62.100.000	590.951.000						
		- Belanja Pemeliharaan				107.400.000		107.094.000	-	107.094.000						
		- Belanja Perjalanan Dinas				158.050.000		156.478.000	990.000	157.468.000						

Gambar 7 : Laporan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021  
Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU

NO.	KODE KEK.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	SARJIT KEGIATAN (DOK/PKT) 1	REALISASI DOK/PKT 1	S/D ANHUR BULAN INI	JUMLAH INDIKATOR ANGGARAN	KEUANGAN						FISIK			PERKULIAHAN & SWTA PERCAHAYANA
							ROK KUMULATIF S/D ANHUR BULAN INI		REALISASI BULAN INI		DEVIASI		ROK KUMULATIF S/D ANHUR BULAN INI		DEVIASI	
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
<b>SEKSI DALUJUA</b>							62.829.000	100,00	55.243.000	7.000.000	63.343.000	99,07	-6,93	100,00	100,00	0,00
1	24	0000	Pembinaan Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang	1. Layanan, Kkn, pemeliharaan, Pengawasan & Baring	Pembinaan Pemeliharaan Ruang	62.829.000	100,00	55.243.000	7.000.000	62.243.000	99,07	-6,93	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			8.500.000		8.528.000		8.528.000						
			- Bekerja Jasa			42.000.000		35.000.000	7.000.000	42.000.000						
			- Bekerja Pengadaan Barang			12.329.000		11.915.000		11.915.000						
<b>SUB BAG TATA USAHA</b>							395.230.000	100,00	337.158.433	15.604.448	382.762.881	96,28	-16,74	100,00	100,00	0,00
1	01		Program Administratif Umum			395.230.000	100,00	337.158.433	15.604.448	382.762.881	96,28	-16,74	100,00	100,00	0,00	
1	01	1.03.01	Pembelian Jasa Surat Memerint	Berita A/C, Berita Cetak dan Pengumuman		1.176.000	100,00	1.176.000	0	1.176.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			1.176.000	100,00	1.176.000	0	1.176.000						
2	01	1.03.10	Pembelian Alat Tulis Kantor	Berita A/C, Berita Cetak dan Pengumuman		20.392.000	100,00	20.141.000	0	20.141.000	98,77	-1,23	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			20.392.000	100,00	20.141.000	-	20.141.000						
3	01	1.03.11	Pembelian Barang Cetak dan Pengumuman	Berita A/C, Berita Cetak dan Pengumuman		11.753.000	100,00	11.752.800	0	11.752.800	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			11.753.000	100,00	11.752.800	0	11.752.800						
4	01	1.03.12	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berita Telepon, Berita Air, Berita Listrik dan Berita Lain-lain	Telepon, Listrik, Air dan Lain-lain	180.720.000	100,00	126.287.233	13.547.448	139.834.681	77,38	-22,62	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Jasa			180.720.000	100,00	126.287.233	13.547.448	139.834.681						
5	01	1.03.16	Pembelian Jasa Katering dan Kantin	Berita Jasa Katering	Katering kantor dan lain-lain	34.500.000	100,00	34.450.000	-	34.450.000	99,86	-0,14	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Jasa			34.500.000	100,00	34.450.000	-	34.450.000						
6	01	1.03.18	Pajak retribusi dan lain-lain	Berita Uang Retribusi	retribusi administratif dan lain-lain	9.536.000	100,00	9.580.000	0	9.580.000	96,42	-3,58	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Pengadaan Barang			9.536.000	100,00	9.580.000	0	9.580.000						
7	01	1.03.17	Pembelian dan Penyewaan	Pelana Katering	3 kali rapat	1.760.000	100,00	1.759.400	-	1.759.400	99,91	-0,09	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			1.760.000	100,00	1.759.400	-	1.759.400						

Gambar 8 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021  
 Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU

NO.	KODE KEK.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	SARJIT KEGIATAN (DOK/PKT) 1	REALISASI DOK/PKT 1	S/D ANHUR BULAN INI	JUMLAH INDIKATOR ANGGARAN	KEUANGAN						FISIK			PERKULIAHAN & SWTA PERCAHAYANA
							ROK KUMULATIF S/D ANHUR BULAN INI		REALISASI BULAN INI		DEVIASI		ROK KUMULATIF S/D ANHUR BULAN INI		DEVIASI	
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
8	01	1.03.15	Pembelian Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Layanan Surat	Surat keluar dan masuk 33 kali	6.000.000	100,00	6.000.000	0	6.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Jasa			6.000.000	100,00	6.000.000	0	6.000.000						
9	01		Pembelian Rutin Berhala Rumah Dinas Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Commerciel	Berita Pemeliharaan Rutin	1 unit rumah dinas	20.000.000	100,00	20.000.000	-	20.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Pemeliharaan			20.000.000	100,00	20.000.000	-	20.000.000						
10	01		Pembelian Rutin Berhala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Commerciel	Berita Pemeliharaan Gedung	5 unit kantor komplek Gedung	33.600.000	100,00	33.589.000	-	33.589.000	99,97	-0,03	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Pemeliharaan			33.600.000	100,00	33.589.000	-	33.589.000						
11	01		Pembelian Rutin Berhala Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Commerciel	Berita BHN, Berita Pemeliharaan Kebutuhan, Berita Jasa OD	1 unit mobil, 7 motor	47.370.000	100,00	44.558.000	2.857.000	46.615.000	96,41	-3,59	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Pemeliharaan			47.370.000	100,00	44.558.000	2.857.000	46.615.000						
12	01	1.03.33	Pembelian Rutin Berhala Lantai Kantor dan Rumah Tanggala	Berita Alat Listrik, Berita pemeliharaan, Berita pemeliharaan, Berita pemeliharaan, dan pemeliharaan pemeliharaan dan lain-lain		33.423.000	100,00	33.265.000	0	33.265.000	99,53	-0,47	100,00	100,00	0,00	
			- Bekerja Barang			33.423.000	100,00	33.265.000	0	33.265.000						
<b>JUMLAH :</b>							12.508.224.000	100,00	11.778.344.483	572.624.448	12.350.968.931	98,74	-1,26	100,00	100,00	0,00

Tanggal: 31 Desember 2021  
 KEPALA BALAI PSDA PEMALI COMAL  
 DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. BARDI, MT  
 NIP. 19602211991021001

Gambar 9 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2022  
 Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU



## Lampiran 5 Lembar Kesepakatan Bimbingan Skripsi

### SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Anti Widianti  
 NIM : 19110019  
 Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik


Pihak Kedua

Nama : Nurul Mahmudah, M. Si, Ak, CA, CAAT  
 Status Dosen/Praktisi : Dosen Tetap  
 NIDN : 0629068902  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Pangkat/Golongan : III B


Pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa Pihak Kedua bersedia menjadi Pembimbing I Skripsi Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama wajib melakukan bimbingan Skripsi minimal 8 kali kepada Pihak Kedua. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan disepakati antar pihak. Demikian kesepakatan ini di buat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Tegal, 28 November 2022

Pihak Pertama

  
Anti Widianti  
 19110019

Pihak Kedua

  
Nurul Mahmudah, M.Si, Ak, CA, CAAT  
 NIPY. 09.015.243

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

  
Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak  
 NIPY. 02.018.366

Gambar 11 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I

### SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Pihak Pertama**

Nama : Anti Widianti  
 NIM : 19110019  
 Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

**Pihak Kedua**

Nama : Nurul Mahmudah, M. Si, Ak, CA, CAAT  
 Status Dosen/Praktisi : Dosen Tetap  
 NIDN : 0629068902  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Pangkat/Golongan : III B

Pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa Pihak Kedua bersedia menjadi Pembimbing II Skripsi Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama wajib melakukan bimbingan Skripsi minimal 8 kali kepada Pihak Kedua. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan disepakati antar pihak. Demikian kesepakatan ini di buat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

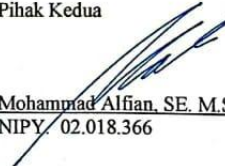
Tegal, 28 November 2022

Pihak Pertama



Anti Widianti  
 19110019

Pihak Kedua



Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak  
 NIPY. 02.018.366

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

  
Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak  
 NIPY. 02.018.366

Gambar 12 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi DOsen Pembimbing II

## Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi





SARJANA TERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA


### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anji Widianti  
 NIM : 19110019  
 No. Ponsel :  
 Judul Skripsi : Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Balai PSDA PC  
 Dosen Pembimbing I : Murul Mahmudah, S.E., M.Si, Ak., CA., CAAT

No.	Tanggal	Perbaikan yang perlu dilakukan	Paraf Pembimbing
1.	30 Nov 2023	Mengajukan beberapa referensi jurnal & judul skripsi.	
2.	16 Maret 2023	Bimbingan penulisan proposal BAB I, II dan III.	
3.	20 April 2023	Revisi proposal BAB I, II dan III.	
4.	26 Mei 2023	Revisi proposal BAB I, II dan III dan ACC proposal.	
5.	21 Juni 2023	ACC proposal pasca ujian Sempro.	
6.	19 Juli 2023	Bimbingan skripsi BAB IV dan V	

7.	17 Juli 2023	Revisian Skripsi BAB IV dan V ACC Skripsi	
8.	6 Sep 2023	Revisian Skripsi Setelah Ujian Skripsi dan ACC Skripsi	

Tegal, 4 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing I

  
Nurul Mahmudah S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT  
NIPY. 09.015/243

Gambar 13 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I



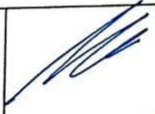



SARJANA TERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

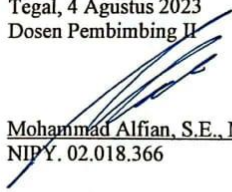
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anji Widianti  
 NIM : 19110019  
 No. Ponsel :  
 Judul Skripsi : Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Balai PSDA PC  
 Dosen Pembimbing II : Mohammad Afian, S.E., M.Si., Ak.

No.	Tanggal	Perbaikan yang perlu dilakukan	Paraf Pembimbing
1.	30 Nov 2023	Mengajukan beberapa revisi Jurnal & Judul Skripsi	
2.	7 Feb 2023	Bimbingan penulisan proposal BAB I, II dan III	
3.	15 Feb 2023	Revisi proposal BAB I, II dan III	
4.	22 Feb 2023	Revisi proposal BAB I, II dan III	
5.	27 Feb 2023	Revisi proposal BAB I, II dan III ACC proposal.	
6.	21 Juni 2023	ACC proposal setelah ujian sempro	

7.	11 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Bab IV-V	
8.	14 Juli 2023	Revisi Skripsi Bab IV - V dan ACC Skripsi	

Tegal, 4 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing II

  
Mohammad Alfian, S.E., M.Si., Ak.  
NIPY. 02.018.366

Gambar 14 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II

## Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Plagiasi



**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

UPT Perpustakaan & Penerbitan

### SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini<sup>\*)</sup>:

Nama : M. Abdul Rohim - S.S.I  
 NIPY : 01.011.081  
 Jabatan : Kepala UPT. perpustakaan dan penerbitan

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir<sup>\*\*)</sup>:

Judul : Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Kinerja Anggaran  
 Berkonsep Value for Money pada Balai Pengelolaan  
 Sumber Daya Air Pamali Comal Dinas Pusdataku

yang ditulis oleh:

Nama Mahasiswa : Anji widianti  
 NIM : 19110019  
 Email : anjiwidianti52@gmail.com

Telah dilakukan uji kesamaan (uji similarity) / uji plagiasi dengan hasil indikasi similaritas 30. %  
 Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, ... 27 - 09 - 2023  
 Petugas Perpustakaan  
 Politeknik Harapan Bersama,

  
 M. Abdul Rohim - S.S.I  
 01.011.081

Keterangan:

\*) Diisi oleh Petugas Perpustakaan Poltek Harber

\*\*) Diisi dengan pengetikan langsung oleh mahasiswa

Jl. Mataram No. 9 Kota Tegal 52143, Jawa Tengah, Indonesia.

(0283)352000

sekretariat@poltektegal.ac.id

poltektegal.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 15 : Surat Keterangan Hasil Plagiasi